

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
SISTEM PENGELOLAAN PETA PADA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL BAGIAN PENGATURAN DAN PENATAAN PERTANAHAN

System Management Maps at Badan Pertanahan Nasional Agency Pengaturan dan Penataan
Pertanahan

untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh nilai Seminar PKL

Oleh:

MARTINUS ROJEFRI AGUS HASUDUNGAN SILALAH

12312466



PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
BANDAR LAMPUNG
MARET
2019

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

Nama : Martinus Rojefri Agus Hasudungan Silalahi
Program Studi : Informatika
Judul Laporan PKL : Sistem Pengelolaan Peta Pada Badan Pertanahan Nasional Bidang Pengaturan Dan Penataan Pertanahan
Instansi/perusahaan : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
Alamat Instansi/Perusahaan : Jl. Basuki Rahman, Teluk Betung Bandar Lampung

Pembimbing,

Pembimbing Laporan PKL
Universitas Teknokrat Indonesia,

Pembimbing Lapangan
Kanwil BPN Provinsi Lampung,

Harry Anggono, M.Sc
NIK. 022 10 03 05

Patar Simanjuntak, S.H
NIP. 196212271983031005

Menyetujui,

Program Studi Informatika
Ketua,

Dyah Ayu Megawaty, M.Kom.
NIK. 022 09 03 05

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI
LAMPUNG

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Martinus Rojefri Agus Hasudungan Silalahi
(12312466)

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 12 Maret 2019

Dewan Penguji

Pembimbing,

Penguji,

Harry Anggono, M.Sc.
NIK. 022 10 03 05

Damayanti, M.Kom.
NIK.022 09 03 04

Laporan ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh nilai Praktik Kerja Lapangan
Tanggal 12 Maret 2019

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Dekan,

Program Studi Informatika
Ketua,

Y. Agus Nurhuda, S.Si., M.Cs.
NIK. 021 05 02 05

Dyah Ayu Megawaty, M.Kom.
NIK. 022 09 03 05

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadirat tuhan yang maha esa atas berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang berjudul " Sistem Pengelolaan Peta pada Badan Pertanahan Nasional Bagian Pengaturan dan Penataan Pertanahan". Laporan PKL ini dilakukan untuk mendapat nilai PKL pada program studi S1 Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Penulis menyadari bahwa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Laporan PKL ini, membantu penulis untuk menyelesaikan laporan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. HM. Nasrullah Yusuf, SE., M.B.A., selaku Rektor Universitas Teknokrat Lampung.
2. Y.Agus Nurhuda, S.Si., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat Lampung.
3. Dyah Ayu Megawaty, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Program Studi S1 Informatika FTIK Teknokrat Lampung.
4. Hary Anggono, M.Cs, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis menyelesaikan Laporan PKL ini.
5. Damayanti, M.Kom. selaku Dosen Penguji.
6. Patar Simanjuntak dan lainnya yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dan juga membantu penulis dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan;

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan semoga Laporan PKL ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Bandarlampung, 18 Febuari 2019

Penulis,

Martinus R.A.H.S.

DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
RINGKASAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan Praktik Kerja Lapangan.....	2
1.5 Metode Pengumpulan Data	2
1.5.1 Observasi	2
1.6 Sistematika Penulisan.....	2
BAB II. LANDASAN TEORI	4
2.1 Definisi Informasi.....	4
2.2 Definisi Sistem	4
2.3 Definisi Sistem Basis Data	4
2.4 Definisi Data.....	4
2.5 UML(<i>Unified Modelling Language</i>)	5
2.5.1 UML (<i>Unified Modelling Language</i>)	5

2.5.2 <i>Use case</i> Diagram.....	5
2.6 Rekayasa Perangkat Lunak.....	8
2.6.1Rekayasa Perangkat Lunak.....	8
2.6.2 <i>Agile Software Development</i>	8
2.6.3 <i>Extream Programming</i>	8
BAB III. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	10
3.1 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung...10	
3.2 Visi dan Misi Kanwil BPN Provinsi Lampung.....	10
3.2.1 Visi Kanwil BPN Provinsi Lampung	10
3.2.2 Misi Kanwil BPN Provinsi Lampung	10
3.3 Struktur Organisasi.....	11
3.4 Uraian Tanggung Jawab Setiap Bagian/Unit	11
3.4.1 Bidang Tata Usaha	11
3.4.2 Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan	12
3.4.3 Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	14
3.4.4 Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan	16
3.4.5 Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat	19
3.4.6 Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.....	21
BAB IV. PEMBAHASAN.....	23
4.1 Laporan Kegiatan Selama Melakukan PKL	23
4.2 Analisis PIECES.....	23

4.3 Tahapan <i>Extream Programming</i>	24
4.4 <i>Planning</i> /Perencanaan	25
4.5 <i>Design</i> /Rancangan <i>Interface</i>	27
4.5.1 <i>Use case Diagram</i>	27
4.5.2 Rancangan <i>Interface</i> sistem.....	27
4.5.3 Laporan Pengelolaan Peta	33
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	35
5.1 Kesimpulan.....	35
5.2 Saran	35
DAFTAR PUSTAKA	36

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.5.2.1 Simbol-simbol Use case Diagram.....	5
Tabel 4.2-1 Analisis PIECES.....	23
Tabel 4.4-1 Planning Sistem Pengelolaan Peta.....	25

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 4.3.1 Tahapan <i>Extream Programming</i>	25
Gambar 4.5.1.1 <i>Use case</i> Diagram Sistem Pengelolaan Peta	27
Gambar 4.5.2.1.1 Halaman <i>Home</i>	27
Gambar 4.5.2.2.1 Halaman <i>Login</i>	28
Gambar 4.5.2.3.1 Halaman <i>Form</i> Pencarian Peta	28
Gambar 4.5.2.4.1 Halaman Mengelola Peta	29
Gambar 4.5.2.5.1 Halaman Mengelola Lemari	29
Gambar 4.5.2.6.1 Halaman Mengelola Laci	30
Gambar 4.5.2.7.1 Halaman Mengelola Baris	30
Gambar 4.5.2.8.1 Halaman Mengelola Provinsi	31
Gambar 4.5.2.9.1 Halaman Mengelola Kabupaten/ Kota	31
Gambar 4.5.2.10.1 Halaman Mengelola Kecamatan	32
Gambar 4.5.2.11.1 Halaman Mengelola Desa/Kelurahan	32
Gambar 4.5.2.12.1 Halaman Mengelola Admin	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Gambar lemari-lemari penyimpanan

Lampiran 2. Gambar Peta-peta

Lampiran 3. Gambar Arsip Peta pada Laci Penyimpanan

Lampiran 4. Struktur Organisasi Kanwil BPN

RINGKASAN

SISTEM PENGELOLAAN PETA PADA KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG BAGIAN PENGATURAN DAN PENATAAN PERTANAHAN

OLEH :

MARTINUS ROJEFRI AGUS HASUDUNGAN SILALAH

Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan memiliki tugas untuk membuat Peta pada Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung. Peta-peta yang dibuat tersimpan pada laci-laci yang ada di Lemari Penyimpanan. Terkait hal tersebut teknologi informasi dapat digunakan.

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian adalah *Extream Programming*. *Extream Programming* merupakan pengembangan dari metode *Agile Software Development* yang cocok dalam pengembangan Sistem berskala kecil dan dinamis terhadap perubahan yang cepat. Metode ini memiliki empat tahapan yaitu Perencanaan, Perancangan, Pengkodean, dan Pengujian.

Laporan PKL ini hanya sebatas rancangan Sistem Pengelolaan Peta pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung yang diharapkan dapat diterapkan pada pengembangan selanjutnya.

Kata Kunci: *Extream Programming*, Sistem Pengelolaan, Sistem Pengelolaan Peta.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung memiliki bidang Pengaturan dan Penatagunaan Pertanahan dengan seksi penatagunaan pertanahan sebagai seksi yang mengurus pemetaan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Lampung.

Pengelolaan peta yang dilakukan menggunakan lemari dengan laci-laci yang memfilter peta berdasarkan wilayah kabupaten atau kota, peta-peta yang di simpan tertulis pada bagian luar laci penyimpanan.

Pencarian peta pada Kanwil BPN provinsi Lampung masih dilakukan dengan cara konvensional yakni dengan melihat satu persatu laci yang tertulis nama peta pada laci penyimpanan, dalam penyimpanan peta dapat ditemukan dua tempat penyimpanan dalam satu wilayah kabupaten atau kota, sehingga akan memakan waktu dalam proses pencarian peta.

Pencarian peta dapat lebih mudah bila dilakukan secara komputerisasi sehingga perlu suatu sistem yang dapat menyelesaikan permasalahan pencarian peta pada Kanwil BPN Provinsi Lampung bagian Pengaturan dan penataan Pertanahan. Berdasarkan permasalahan tersebut dibutuhkan suatu sistem pengelolaan peta pada badan pertanahan nasional bagian pengaturan dan penataan pertanahan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, persoalan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tahapan dalam Pengembangan Sistem yang dibangun menggunakan dengan *Extream Programming*?
2. Bagaimana Sistem Pengelolaan Peta pada Kanwil BPN Provinsi Lampung?

1.3. Batasan Masalah

Sistem Pengelolaan Peta di kembangkan menggunakan metode *Extream Programming*. Penulis tidak menuliskan proses Coding dan Testing dalam Laporan PKL .

1.4. Tujuan Praktik Kerja Lapangan

1. Mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Pengelolaan Peta dengan metode Extream Programing.
2. Membuat suatu sistem terkomputerisasi yang mampu mengatasi permasalahan penginputan dan pengelolaan data peta yang tersimpan pada lemari penyimpanan.
3. Memberikan kemudahan serta kelancaran bagi Kanwil BPN Provinsi Lampung dalam pengelolaan, penyimpanan, maupun pencarian data peta ketika dibutuhkan

1.5. Metode Pengumpulan Data

1.5.1. Observasi

Observasi adalah aktivitas yang dilakukan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud untuk merasakan dan memahami sebuah fenomena, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan.

1.6. Sistematika Penulisan

Halaman Intisari/Abstrak

Bagian ini memuat uraian singkat tetapi padat dan jelas serta memberikan gambaran menyeluruh tentang isi Laporan PKL.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat tentang latar belakang Laporan, rumusan masalah yang akan dicari pemecahannya, Batasan Masalah Laporan, Tujuan Laporan PKL, Manfaat Laporan PKL, Metode Pengumpulan Data, serta Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini akan diuraikan secara teoritis tentang Definisi Sistem, Definisi Informasi, Definisi Sistem Informasi, Definisi Basis Data.

BAB III GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Bagian ini menguraikan tentang Gambaran Umum Organisasi yang meliputi Sejarah Organisasi, Proses Bisnis Organisasi, Visi dan Misi Organisasi, Struktur Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab personil dalam struktur organisasi, Dan Lokasi Organisasi.

BAB IV PEMBAHASAN

Bagian ini memuat hasil kajian dan pembahasan atas penelitian penulis di lapangan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan berdasarkan kajian pembahasan yang harus dapat menjawab rumusan masalah yang diuraikan pada BAB I. serta untuk menyampaikan masalah yang dimungkinkan untuk penelitian lebih lanjutnya maupun perbaikan yang harus dilakukan sesuai dengan kesimpulan yang didapatkan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Definisi Informasi

Informasi adalah data yang dirubah menjadi bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi pihak yang menerimannya. Sedangkan data adalah suatu kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dari kesatuan nyata. Menurut (Jogiyanto H.M, 2003) “Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya” Sumber dari informasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal datum atau data-item.

2.2. Definisi Sistem

Menurut (*Jogiyanto H.M, 2003:34*) menyatakan bahwa sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan dengan pendekatan komponen. Menurut (*Jogiyanto H.M,2005:2*) dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi menjelaskan bahwa " Sistem merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu".

2.3. Definisi Sistem Basis Data

Menurut (Rosa A.S, M. Salahuddin,2013 : 43) Sistem basis data adalah sistem terkomputerisasi yang tujuan utamanya adalah memelihara data yang sudah diolah atau informasi dan membuat informasi tersedia saat dibutuhkan. Pada intinya basis data adalah media untuk menyimpan data agar dapat diakses dengan mudah dan cepat.

2.4. Definisi Data

Menurut (*Jogiyanto H.M, 2005*) data adalah kumpulan kejadian-kejadian yang diangkat dar suatu kenyataan dapat berupa angka-angka, huruf-huruf dan simbol-simbol khusus sehingga perlu diolah lebih lanjut.

Data menurut (*Nugroho, Adi, 2004*) adalah fakta tentang suatu di duinia nyata yang dapat direkam dan disimpan pada media komputer.

Data merupakan suatu fakta atau nilai yang belum mempunyai makna secara konseptual, data adalah deskripsi tentang benda kejadian aktifitas dan transaksi kejadian yang tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai.

2.5. UML(*Unified Modelling Language*)

2.5.1. UML (*Unified Modelling Language*)

Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah bahasa pemodelan visual yang dirancang khusus untuk pengembangan dan analisis sistem berorientasi objek dan desain. UML pertama kali dikembangkan oleh Grady Booch, Jim Rumbaugh, dan Ivars Jacobson pada pertengahan tahun 1990. (Journal of Database Management: Keng Siau and Qing Cao, 2001:26)

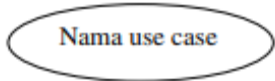

UML menyediakan 4 macam diagram untuk memodelkan aplikasi perangkat lunak berorientasi objek. Yaitu: *Use Case Diagram*, *Class Diagram*, *Activity Diagram*, dan *Sequence Diagram*.



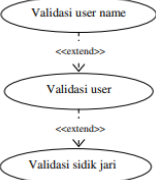

2.5.2. *Use case Diagram*

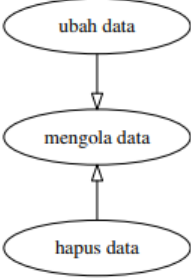
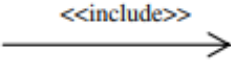
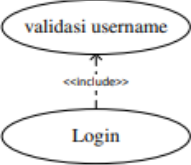
Use case diagram adalah sebuah diagram yang menunjukkan hubungan antara *actors* dan *use cases*. Digunakan untuk analisis dan desain sebuah sistem. (The Elements of UML 2.0: Scott W.Ambler, 2005:33)

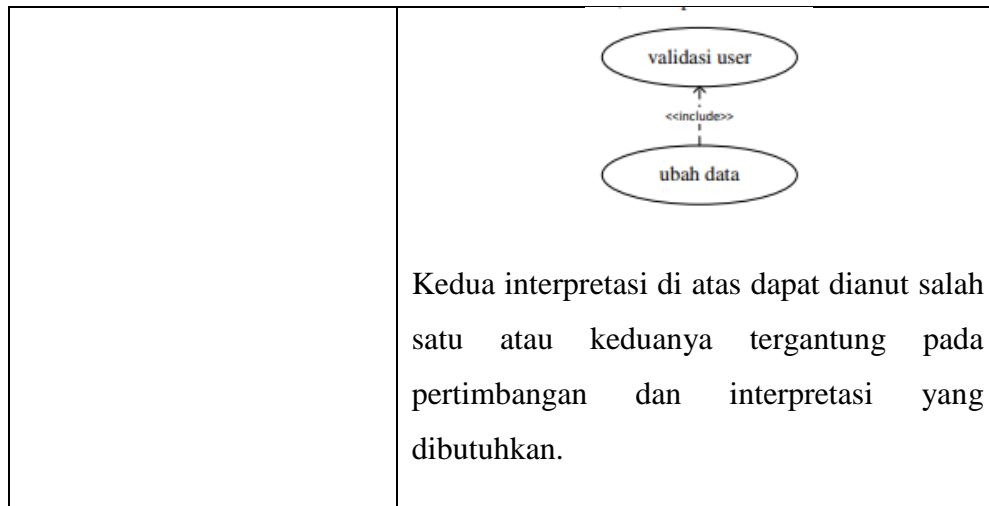
Berikut ini simbol-simbol dari sebuah *Use case Diagram* :

Tabel 2.5.2.1 Simbol-simbol *Use case Diagram*

Simbol	Deskripsi
<p><i>Use cases</i></p> 	<p>Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor, biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata kerja diawal frase nama <i>use case</i>.</p>
<p><i>Actor</i></p> 	<p>Orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri, jadi walaupun</p>

	<p>simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang, biasanya dinyatakan menggunakan kata benda di awal frase nama aktor.</p>
<p><i>Association/Assosiasi</i></p> 	<p>Komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case atau use case memiliki interaksi dengan aktor.</p>
<p><i>Extend/Exstensi</i></p> 	<p>Relasi use case tambahan kesebuah use case dimana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa use case tambahan itu, mirip dengan prinsip inheritance pada pemrograman berorientasi objek, biasanya use case tambahan memiliki nama depan yang sama dengan use case yang ditambahkan, misal</p>  <p>Arah panah mengarah pada use case yang ditambahkan, biasanya use case yang menjadi extend-nya merupakan jenis yang sama dengan use case yang menjadi induknya.</p>
<p><i>Generalization/Generalisasi</i></p> 	<p>Hubungan generalisasi dan spesialisasi (umum-khusus) antara dua buah use case dimana fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari lainnya, misalnya :</p>

	 <pre> graph TD A([hapus data]) --> B([mengola data]) B --> C([ubah data]) </pre> <p>arah panah mengarah pada use case yang menjadi generalisasinya (umum)</p>
<p>Include/Menggunakan</p>  <pre> graph TD A([Login]) --> <<include>> B([validasi username]) </pre>	<p>Relasi use case tambahan ke sebuah use case dimana use case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankan use case ini Ada dua sudut pandang yang cukup besar mengenai include di use case :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Include berarti use case yang ditambahkan akan selalu di panggil saat use case tambahan dijalankan, missal pada kasus berikut :  <pre> graph TD A([Login]) --> <<include>> B([validasi username]) </pre> <ul style="list-style-type: none"> - Include berarti use case yang tambahan akan selalu melakukan pengecekan apakah use case yang di tambahkan telah dijalankan sebelum use case tambahan di jalankan, misal pada kasus berikut :



2.6. Rekayasa Perangkat Lunak

2.6.1. Rekayasa Perangkat Lunak

Menurut IEEE 610.12 : "Rekayasa perangkat lunak adalah sebuah studi dalam aplikasi dari pendekatan kuantifiabel, disiplin, dan sistematis kepada pengembangan, operasi dan pemeliharaan perangkat lunak yang kesemuanya itu merupakan aplikasi rekayasa yang berkaitan dengan perangkat lunak".

Rekayasa perangkat lunak (*software engineering*) merupakan pembangunan dengan menggunakan prinsip atau konsep rekayasa dengan tujuan menghasilkan perangkat lunak yang bernilai ekonomi yang dipercaya dan bekerja secara efisien menggunakan mesin.

2.6.2. *Agile Software Development*

Menurut Pressman (2009), *Agile Software Development* adalah sekumpulan metodologi pengembangan perangkat lunak yang berbasis pada pengembangan iteratif, dimana persyaratan dan solusi berkembang melalui kolaborasi antara tim yang terorganisir. Istilah ini diciptakan pada tahun 2001 ketika *Agile Manifesto* dirumuskan.

2.6.3. *Extreme Programming*

Menurut Pressman (2009), *Extreme Programming (XP)* adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas

perangkat lunak dan tanggap terhadap perubahan kebutuhan pelanggan. Jenis pengembangan perangkat lunak semacam ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas dan memperkenalkan pos pemeriksaan dimana persyaratan pelanggan baru dapat diadopsi.

Tahapan-tahapan dari *Extream Programming* terdiri dari :

1. *Planning*, aktifitas yang juga disebut sebagai *the planning game* dimulai dengan "mendengarkan" yaitu sebuah aktifitas mengumpulkan kebutuhan yang memungkinkan para anggota teknikal dari tim XP untuk memahami konteks bisnis untuk perangkat lunak dan untuk mendapatkan *output* yang dibutuhkan dan fitur utama serta fungsionalitas.
2. *Design*, menyediakan panduan implementasi untuk proses seperti yang sudah dituliskan. Gagasan pusat di dalam XP adalah design terjadi sebelum dan setelah *coding* dimulai.
3. *Coding*, menterjemahkan penjabaran yang sudah dilakukan pada tahap penulisan kode program.
4. *Testing*, pada tahap ini unit test yang dikreasikan harus diimplementasikan menggunakan framework yang memungkinkan mereka menjadi otomatis (karenanya, dapat dieksekusi dengan mudah dan berulang ulang). Hal ini mendorong strategi regresi testing ketika kode dimodifikasi.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung

Kantor Wilayah Provinsi Lampung adalah instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dipimpin oleh seorang Kepala, dibantu masing-masing oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan, Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

3.2. Visi dan Misi Kanwil BPN Provinsi Lampung

3.2.1. Visi Kanwil BPN Provinsi Lampung

Menjadi Lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.

3.2.2. Misi Kanwil BPN Provinsi Lampung

Mengembangkan dan Menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk:

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan subur-suber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.
2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).
3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan

penataan perangkat hukum dan sistem pehelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik, dan perkara di kemudian hari.

4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa semangat, prinsip dan aturan yang tertuan dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.

3.3. Struktur Organisasi

Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dipimpin oleh Kepala, serta terdiri dari beberapa bidang yang menangani masalah pertanahan yang dibagi dalam beberapa bagian untuk mempermudah tugas-tugas Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung antara lain :

1. Bidang Tata Usaha
2. Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan,
3. Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah,
4. Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan,
5. Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat,
6. Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

3.4. Uraian Tanggung Jawab Setiap Bagian/Unit

3.4.1. Bidang Tata Usaha

Dalam menjalankan tugasnya Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program, dan peraturan Perundang-Undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;

2. Koordinasi pelayanan pertanahan;
3. Pengelolaan data dan informasi;
4. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
5. Evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga.

Adapun untuk memudahkan tugas-tugasnya bagian tata usaha di bagi dalam beberapa sub bagian antara lain:

3.4.1.1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana, program, dan anggaran, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah serta urusan keuangan dan pelaksanaan anggaran.

3.4.1.2. Subbagian Kepegawaian.

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia pertanahan.

3.4.1.3. Subbagian Umum dan Informasi.

Subbagian Umum dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan suratmenyurat, perlengkapan, dan rumah tangga, pelayanan data dan informasi serta menyiapkan koordinasi pelayanan pertanahan.

3.4.2. Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan

Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan survei, pengukuran, dan pemetaan bidang tanah, ruang, dan perairan; perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan tematik, dan survei potensi tanah, pembinaan surveyor berlisensi.

Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan kebijakan teknis survei, pengukuran, dan pemetaan bidang tanah, ruang, dan perairan; perapatan kerangka dasar pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan tematik, dan survei potensi tanah, pembinaan surveyor berlisensi;
2. Pelaksanaan perapatan kerangka dasar orde 3, dan orde 4 serta pengukuran batas kawasan/wilayah;
3. Pelaksanaan pengukuran, perpetaan, pembukuan bidang tanah, dan ruang;
4. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik serta survei potensi tanah;
5. Pelaksanaan bimbingan tenaga teknis, surveyor berlisensi, dan pejabat penilai tanah;
6. Pelaksanaan pemeliharaan, pengelolaan, dan pengembangan peralatan teknis, dan teknologi komputerisasi.

Adapun Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan terdiri dari:

3.4.2.1. Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar

Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar mempunyai tugas melakukan perapatan kerangka dasar, dan pengukuran batas kawasan/wilayah serta pemeliharaan, pengelolaan, dan pengembangan peralatan teknis, dan teknologi komputerisasi.

3.4.2.2. Seksi Pemetaan Tematik

Seksi Pemetaan Tematik mempunyai tugas melakukan survei, pemetaan, pemeliharaan, dan pengembangan pemetaan tematik dalam data tekstual, dan spasial.

3.4.2.3. Seksi Pengukuran Bidang

Seksi Pengukuran Bidang mempunyai tugas melakukan pengukuran, perpetaan, pembukuan bidang tanah, ruang, dan perairan serta bimbingan teknis, dan surveyor berlisensi.

3.4.2.4. Seksi Survei Potensi Tanah;

Seksi Survei Potensi Tanah mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan pengembangan survei potensi tanah dalam data tekstual dan spasial serta pembinaan teknis pejabat penilai tanah.

3.4.3. Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas mengkoordinasikan, dan melaksanakan penyusunan program, pemberian perijinan, pengaturan tanah pemerintah, pembinaan, pengaturan, dan penetapan hak tanah, pembinaan pendaftaran hak atas tanah, dan komputerisasi pelayanan.

Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan kebijakan teknis pengaturan dan penetapan hak tanah;
2. Penetapan hak tanah, perairan, ruang atas tanah, dan ruang bawah tanah, yang meliputi pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan hak tanah;
3. Pembinaan dan pengendalian proses serta pelaksanaan kewenangan pemberian hak atas tanah;
4. Pengelolaan administrasi tanah-tanah instansi pemerintah, tukar-menukar, dan penaksiran tanah, dan mengadministrasikan atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara, daerah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
5. Pemberian rekomendasi dan perijinan hak tanah bekas milik Belanda dan bekas tanah asing lainnya dalam rangka penetapan hak dan hak pengelolaan;
6. Penyusunan telaahan permasalahan dalam rangka penyelesaian penetapan hak dan hak pengelolaan;
7. Pendataan tanah bekas tanah hak dan penyajian informasi hak-hak tanah;
8. Pengaturan sewa tanah untuk bangunan, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan tanah;

9. Pemberian ijin pengalihan dan pelepasan hak tanah tertentu;
10. Pembinaan teknis hak-hak tanah;
11. Pembinaan pendaftaran hak dan komputersasi pelayanan pertanahan;
12. Pembinaan penegasan dan pengakuan hak atas tanah bekas hak Indonesia;
13. Pembinaan peralihan dan pembebanan hak atas tanah serta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah terdiri dari beberapa seksi untuk memudahkan menjalankan tugas-tugasnya antara lain:

3.4.3.1. Seksi Penetapan Hak Tanah Perorangan

Seksi Penetapan Hak Tanah Perorangan mempunyai tugas melakukan penelitian, telaahan, pengolahan urusan permohonan hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai bagi perorangan, dan tanah wakaf, penyiapan bahan perijinan, dan rekomendasi serta pembinaannya.

3.4.3.2. Seksi Penetapan Hak Tanah Badan Hukum

Seksi Penetapan Hak Tanah Badan Hukum mempunyai tugas melakukan penelitian, telaahan, pengolahan urusan permohonan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah badan hukum, penyiapan bahan perijinan dan rekomendasi serta pembinaannya.

3.4.3.3. Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah

Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah mempunyai tugas melakukan penelitian, telaahan, pengolahan urusan permohonan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan atas tanah, tanah pemerintah, dan badan hukum pemerintah, penyiapan bahan perijinan, rekomendasi, dan pembinaannya, serta mengadministrasikan atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara dan daerah.

3.4.3.4. Seksi Pendaftaran, Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Seksi Pendaftaran, Peralihan, Pembebanan Hak, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai tugas menyiapkan pembinaan pendaftaran hak, penegasan, dan pengakuan hak atas tanah bekas hak Indonesia, peralihan, pembebanan hak atas tanah, pembebanan hak tanggungan, dan pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

3.4.4. Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan

Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan penatagunaan tanah, penataan 32 pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan kawasan tertentu lainnya, landreform, dan konsolidasi tanah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan koordinasi pelaksanaan landreform, penatagunaan tanah, konsolidasi tanah, dan penataan pertanahan kawasan tertentu
2. Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah
3. Pelaksanaan kebijakan pengaturan dan penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah
4. Penyiapan rencana persediaan tanah, peruntukan, pemeliharaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
5. Penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan kawasan tertentu lainnya
6. Penyiapan dan penetapan neraca perubahan dan neraca kesesuaian penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, dan neraca ketersediaan tanah Provinsi dan Kabupaten/Kota

7. Penyiapan dan pelaksanaan pola penyesuaian penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan fungsi kawasan
8. Penetapan kriteria kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka perwujudan fungsi kawasan/zoning
9. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan kawasan tertentu lainnya;
10. Pelaksanaan penerbitan pertimbangan teknis penatagunaan tanah, ijin perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan kewenangannya
11. Pengembangan dan pemeliharaan basis data penatagunaan tanah
12. Pelaksanaan monitoring, dan evaluasi pemeliharaan tanah, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap kawasan;
13. Pengusulan penetapan/penegasan, pengeluaran tanah menjadi obyek landreform; redistribusi tanah (pembagian tanah) dan ganti kerugian tanah obyek landreform serta pemanfaatan tanah bersama
14. Pemberian izin peralihan hak atas tanah pertanian dan izin redistribusi tanah yang luasnya tertentu
15. Penetapan pengeluaran tanah dari obyek landreform hasil penertiban redistribusi
16. Penegasan obyek konsolidasi tanah dan pelaksanaan konsolidasi tanah
17. Pengkoordinasian dan pengendalian penyediaan tanah untuk pengembangan wilayah melalui konsolidasi tanah, penataan tanah bersama untuk peremajaan kota, daerah bencana dan daerah bekas konflik, permukiman kembali, pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan serta penguasaan tanahtanah obyek landreform
18. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pendokumentasian data landreform.

Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan terdiri dari:

3.4.4.1. Seksi Penatagunaan Tanah

Seksi Penatagunaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program persediaan, peruntukan dan penatagunaan tanah, pengaturan dan penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah; neraca penatagunaan tanah 34 dan ketersediaan tanah; bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis penatagunaan tanah, ijin perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah; inventarisasi data, mengelola basis data dan sistem informasi geografi.

3.4.4.2. Seksi Penataan Kawasan Tertentu

Seksi Penataan Kawasan Tertentu mempunyai tugas menyiapkan zonasi dan penataan pemanfaatan zonasi serta penetapan pembatasan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan, dan kawasan tertentu sesuai daya dukung lingkungan.

3.4.4.3. Seksi Landreform

Seksi Landreform mempunyai tugas mengusulkan penetapan tanah obyek landreform, penegasan tanah negara menjadi obyek landreform, pengeluaran tanah menjadi obyek landreform; mengkoordinasikan penguasaan tanah-tanah obyek landreform; memberi ijin peralihan tanah pertanian, dan ijin redistribusi tanah dengan luasan tertentu; melakukan pengeluaran tanah dari obyek landreform hasil penertiban surat keputusan redistribusi; monitoring, evaluasi, dan bimbingan redistribusi tanah, ganti kerugian, pemanfaatan tanah bersama dan penertiban administrasi landreform.

3.4.4.4. Seksi Konsolidasi Tanah

Seksi Konsolidasi Tanah mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan pengendalian penyediaan tanah melalui

konsolidasi tanah, pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan, penataan tanah bersama untuk peremajaan permukiman kumuh, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta permukiman.

3.4.5. Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar, dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat;
2. Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar, dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan, evaluasi, dan penertiban kebijakan dan program pertanahan, program sektoral, dan pengelolaan tanah negara, tanah terlantar, dan tanah kritis serta saran tindak dan langkah-langkah penanganan serta usulan rekomendasi, pembinaan, dan peringatan serta penertiban dan pendayagunaan dalam rangka pengelolaan tanah negara serta penanganan tanah terlantar dan tanah kritis;
4. Penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghentian hubungan hukum atas tanah terlantar;
5. Inventarisasi potensi masyarakat marjinal, asistensi, fasilitasi, dan peningkatan akses ke sumber produktif;

6. Bimbingan masyarakat, lembaga masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra kerja pertanahan dalam rangka pengelolaan pertanahan;
7. Pengkoordinasian dan kerjasama dengan lembaga pemerintah provinsi dan non pemerintah, serta supervisi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan oleh Kantor Pertanahan;
8. Pengelolaan basis data pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat;

Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:

3.4.5.1. Seksi Pengendalian Pertanahan

Seksi Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas mengelola basis data, evaluasi hasil inventarisasi, dan atau identifikasi serta penyusunan saran tindak, dan langkah-langkah penanganan, serta penyiapan usulan penertiban, dan pendayagunaan dalam rangka penegakan hak, dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pengendalian penerapan kebijakan dan program pertanahan; pengelolaan tanah negara, serta penanganan tanah terlantar dan kritis.

3.4.5.2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan inventarisasi potensi, asistensi, fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan, dan melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat, mitra kerja teknis dalam pengelolaan pertanahan, serta melakukan kerjasama pemberdayaan dengan pemerintah dan non pemerintah serta menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan.

3.4.6. Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan;
2. Pelaksanaan penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan;
4. Penyiapan bahan dan penanganan masalah, sengketa, dan konflik pertanahan secara hukum dan non hukum; mediasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan; penanganan perkara di pengadilan;
5. Penyiapan usulan dan rekomendasi pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan;

6. Penelitian data dan penyiapan pembatalan serta penyiapan usulan rekomendasi dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah;
7. Pengkoordinasian dan bimbingan teknis penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan.

Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan terdiri dari :

3.4.6.1. Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik, pembatalan, dan penghentian, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah; pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis.

3.4.6.2. Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan

Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkajian, dan penyelesaian perkara, pembatalan, dan penghentian, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan serta koordinasi dan bimbingan teknis.

BAB IV. PEMBAHASAN

4.1. Laporan Kegiatan Selama Melakukan PKL

Selama Kegiatan PKL penulis diberikan tugas untuk membuat program salah satunya Sistem Pengelolaan Peta dan beberapa tugas sederhana seperti pengetikan laporan dan Editing foto, dikarenakan belum banyaknya tugas atau kesibukan pada bidang pengaturan dan penatagunaan pertanahan sehingga penulis hanya sebatas melakukan pengumpulan data dengan teknik observasi dalam kegiatan PKL, dimana observasi memiliki keuntungan yaitu analis dapat melihat langsung bagaimana sistem lama berjalan dan mampu menghasilkan gambaran lebih baik dari teknik lainnya.

4.2. Analisis PIECES

Untuk melakukan analisis terhadap kelemahan sistem yang sedang berjalan pada Kanwil BPN Provinsi Lampung, maka dilakukan metode PIECES yaitu *Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, Service*.

Tabel 4.2-1 Analisis PIECES

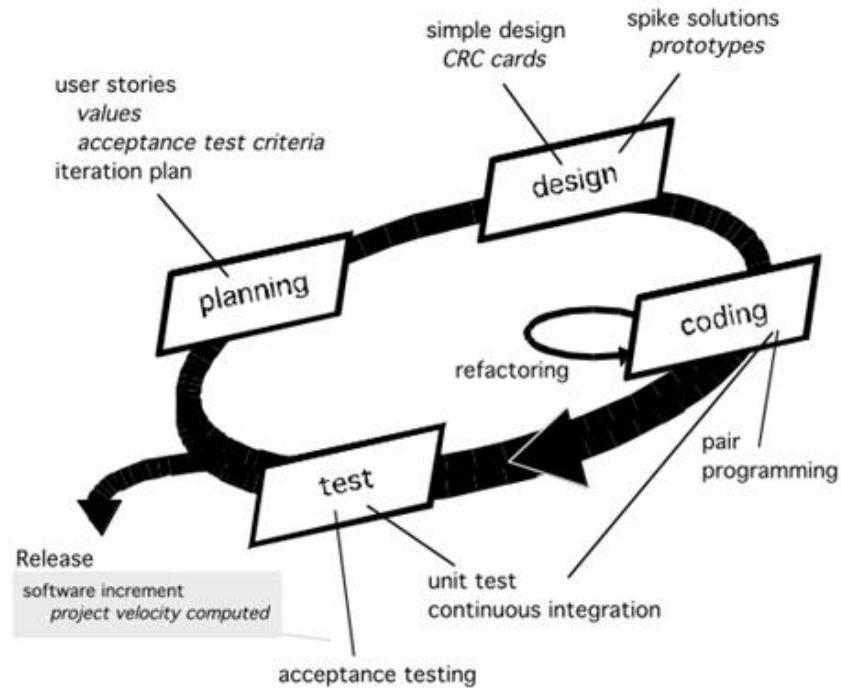
Analisis	Parameter	Hasil Analisis
Kinerja (Performance)	Throughtput	Jumlah informasi yang dihasilkan sebatas informasi yang ada di laci-laci penyimpanan serta dalam proses pencarian peta harus melihat satu-persatu informasi yang ada pada laci-laci penyimpanan. bila terjadi perubahan maka informasi tidak berubah secara langsung.
	Respon time	Respon terhadap permintaan informasi lambat, karena harus mencari informasi tersebut pada laci-laci penyimpanan.
Informasi (Information)	Akurat	Informasi yang ada di laci-laci penyimpanan rentan terhadap gangguan yang dapat merusak informasi.
	Relevan	Informasi pada laci-laci penyimpanan bisa saja diberikan ke pihak yang tidak membutuhkan informasi tersebut.

	Tepat waktu	Informasi yang dihasilkan tidak up to date. karena bila terjadi penambahan atau perubahan maka informasi tidak berubah pada kertas dibagian laci-laci penyimpanan.
Ekonomi (Economy)	Biaya	Memerlukan dana dalam mencetak kertas yang terletak di bagian laci-laci penyimpanan.
Pengendalian (Control)	Informasi	Informasi dapat di ubah-ubah; sebatas kertas yang terletak pada bagian laci-laci penyimpanan.
Efisiensi (Efficiency)	Sumber daya	Sumber daya yang digunakan sebatas arsip/kertas informasi peta yang terletak pada bagian laci penyimpanan sehingga untuk mendapatkan informasi peta harus memeriksa satu persatu informasi pada laci penyimpanan.
	Pemanfaatan Waktu	Pemanfaatan waktu yang dibutuhkan dalam pencarian dirasa kurang efisien. karena harus mencari satu persatu arsip/informasi peta yang terletak pada bagian laci penyimpanan.
Pelayanan (Service)	Informasi	Informasi yang diberikan berupa kertas yang terletak pada laci penyimpanan. Contoh : untuk mencari peta harus mencari satu persatu lemari dan laci-laci penyimpanan
	Kemudahan	Kita tidak bisa mengakses informasi peta dimanapun serta harus memeriksa satu persatu laci penyimpanan. Contoh: untuk dapat informasi terbaru tentang penyimpanan peta harus datang ke kantor dan memeriksa satu persatu laci penyimpanan.

4.3. Tahapan Sistem Pengelolaan Peta dengan Metode *Extream Programming*

Metode *Extream Programming* (XP) merupakan suatu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak cepat.

(Pressman, 2012:88) Alasan menggunakan metode Extreme Programming (XP) karena sifat dari aplikasi yang dikembangkan dengan cepat melalui tahapan-tahapan yang meliputi: Planning/Perencanaan, Desing/Perancangan, Coding/Pengkodean, dan Testing/ Pengujian. Adapun tahapan pada Extreme Programming dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 4.3-1 Tahapan Extreme Programming

4.4. Planning/Perencanaan

Setelah melakukan Observasi penulis mendapatkan data-data yang terkait dalam pembuatan sistem pengelolaan peta yang terdapat dalam peta dan lemari penyimpanan berikut rincian fungsi/proses dan data yang di butuhkan dalam sistem :

Tabel 4-1 Planning Sistem Pengelolaan Peta

Fungsi / Proses	Data	Deskripsi
Login	Username; Password	Merupakan proses untuk melakukan login admin. admin perlu masuk sistem untuk mengubah, menambah atau menghapus data yang ada dalam sistem

Home		Merupakan tampilan pertama saat sistem berjalan
Seksi	WP3WT, Landreform, Konsolidasi Tanah, dan Penatagunaan Tanah	Merupakan proses yang berisikan informasi mengenai seksi-sekis yang ada dalam Bidang Pegaturan dan Penataan Pertanahan terdiri dari WP3WT, Landreform, Konsolidasi Tanah, maupun Penatagunaan Tanah.
Pencarian Peta		Merupakan proses pencarian peta yang terdapat dalam lemari penyimpanan dimana proses ini tidak perlu melakukan login.
Mengelola Admin	Username; Password	Merupakan proses untuk mengelola data admin seperti menambah, mengubah, melihat dan penghapusan data admin.
Mengelola Wilayah	Provinsi, Kabupaten /Kota, Kecamatan, Desa	Merupakan proses untuk mengelola data Wilayah seperti menambah, mengubah dan menghapus data dari provinsi, kabupaten / kota, kecamatan ataupun desa
Mengelola Lemari Penyimpanan	Lemari; Laci; Baris	Merupakan proses untuk mengelola data Lemari Penyimpanan seperti menambah, mengubah, melihat dan penghapusan data dari lemari, laci, atau baris penyimpanan
Mengelola Peta	Peta, Tahun, Wilayah, Lemari Penyimpanan	Merupakan proses untuk menambah, mengubah dan menghapus serta melihat data Peta

Halaman Home akan muncul pertama kali ketika user membuka sistem pengelolaan peta yang berisikan informasi fungsi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan dan Seksi-Seksi yang membantu bidang tersebut.

4.5.2.2. Login



Gambar 4.5.2.2.1 Halaman Login

Halaman Login akan muncul ketika user atau pengguna masuk untuk mengakses informasi di dalam sistem pengelolaan peta.

4.5.2.3. Pencarian Peta



Gambar 4.5.2.3.1 Halaman Form Pencarian Peta

Form Pencarian Peta untuk melakukan pencarian peta yang di simpan pada lemari penyimpanan. Pencarian peta tidak perlu melakukan login untuk mengaksessnya. pencarian dapat dilakukan berdasarkan nama peta, wilayah, atau tahun pembuatan peta.

4.5.2.4. Mengelola Peta



Gambar 4.5.2.4.1 Halaman Mengelola Peta

Peta terdiri dari form menambah, mengubah, melihat dan menghapus data Peta yang tersimpan dalam sistem. data-data yang ada dalam peta terdiri dari: ID, Kode Peta, Nama Peta, Wilayah (Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan), Tahun, dan Tempat Penyimpanan (Lemari, Laci, Baris).

4.5.2.5. Halaman Mengelola Lemari



Gambar 4.5.2.5.1 Halaman Mengelola Lemari

Lemari terdiri dari form menambah, mengubah, melihat dan menghapus data yang tersimpan dalam sistem, data-data yang terdapat dalam Lemari : ID, Kode Lemari, Nama Lemari, dan Lokasi.

4.5.2.6. Halaman Mengelola Laci



Gambar 4.5.2.6.1 Halaman Mengelola Laci

Laci terdiri dari form menambahkan, form mengubah, form melihat data laci dan form menghapus data laci . Data-data Laci terdiri dari : ID, Kode, Nama Laci (di ambil dari kode Lemari), Kode Laci, Nama Laci, dan Lokasi.

4.5.2.7. Halaman Mengelola Baris



Gambar 4.5.2.7.1 Halaman Mengelola Baris

Form Baris terdiri dari menambah, mengubah, melihat, dan manghapus data Baris laci, data-data baris terdiri dari : ID, Kode, Lemari, Laci, Kode Baris, Nama baris, dan Lokasi baris.

4.5.2.8. Halaman Mengelola Provinsi



Gambar 4.5.2.8.1 Halaman Provinsi

Provinsi terdiri dari form menambah, melihat, mengubah dan menghapus data provinsi yang tersimpan dalam sistem. data-data provinsi yakni : ID, Kode, Kode Propinsi, dan Nama Propinsi.

4.5.2.9. Halaman Mengelola Kabupaten/Kota



Gambar 4.5.2.9.1 Halaman Mengelola Kabupaten/ Kota

Kabupaten/Kota terdiri dari form menambah, menghapus, melihat dan mengubah data kabupaten/kota yang terdapat dalam sistem, data-data tersebut tersiri dari : ID, Kode, Propinsi, Kode Kabupaten/Kota, dan Nama Kabupaten Kota.

4.5.2.10. Halaman Mengelola Kecamatan



Gambar 4.5.2.10.1 Halaman Mengelola Kecamatan

Kecamatan terdiri dari form melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data kecamatan yang terdapat dalam sistem. data-data tersebut yakni : ID, Kode, Propinsi, Kabupaten/Kota, kode Kecamatan, dan Nama Kecamatan.

4.5.2.11. Halaman Mengelola Desa/Kelurahan



Gambar 4.5.2.11.1 Halaman Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan terdiri dari Form melihat, menghapus, menambah, dan mengubah data kelurahan yang tersimpan dalam sistem. data-data tersebut terdiri dari : ID, Kode, Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kode Kelurahan, dan Nama Kelurahan.

4.5.2.12. Mengelola Admin



Gambar 4.5.2.12.1 Halaman Mengelola Admin

Admin terdiri dari form menambah, mengubah, melihat, dan menghapus data Admin yang tersimpan dalam sistem. data-data yang tersimpan terdiri dari : Username dan Password.

4.5.3. Laporan Pengelolaan Peta

Laporan Pengelolaan Peta merupakan Output dari Sistem Pengelolaan Peta pada Badan Pertanahan Nasional Bagian Pengaturan dan Penataan Pertanahan. Laporan ini memiliki Field ID, Kode Peta, Nama Peta, Wilayah, Tahun, dan Tempat Penyimpanan. ID berisikan ID yang diisi secara otomatis oleh sistem. Kode Peta berisikan Kode dari Peta yang disimpan, Nama peta berisikan Nama dari Peta yang disimpan, Wilayah berisikan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dari peta yang disimpan, Tahun berisikan Tahun pembuatan peta, dan Tempat Penyimpanan berisikan Lemari, Laci dan baris dari tempat penyimpanan peta.

Berikut ini merupakan contoh Laporan Pengelolaan Peta :

LOGO

**KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI LAMPUNG
BAGIAN PENGATURAN DAN PENATAAN PERTANAHAN**

JL. Basuki Rahmat, Teluk Betung, Bandar Lampung

Laporan Pengelolaan Peta

ID	Kode Peta	Nama Peta	Wilayah	Tahun	Tempat Penyimpanan
19	P001	Peta Penggunaan Lahan	Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Selatan, Marang	2009	Lemari :A dan lokasi di dekat kepala seksi Penatagunaan Tanah; Laci :A1 : Kota Bandar Lampung; Baris :21
20	P020	Peta Penggunaan Lahan	Propinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus	2010	Lemari :A dan lokasi di dekat kepala seksi Penatagunaan Tanah; Laci :A5 : Kabupaten Tanggamus; Baris :2

Seksi Penatagunaan Tanah.

Bandar Lampung, 8 Maret 2019

Admin.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan yang telah dilakukan maka disimpulkan sistem pengelolaan peta menggunakan metode *Extream Programming* memiliki tahapan yakni Perencanaan dan perancangan. Perencanaan dimulai dengan pengumpulan kebutuhan yang membantu memahami konteks bisnis dari sebuah aplikasi. selain itu pada tahapan ini juga mengidentifikasi output yang akan dihasilkan. fitur yang di miliki aplikasi yang dikembangkan. Perancangan menekankan desain aplikasi yang sederhana untuk mendesain aplikasi.
2. Rancangan Sistem Pengelolaan Peta pada Kanwil BPN Provinsi Lampung diharapkan dapat diimplementasikan dalam pengelolaan peta sehingga dapat membantu pegawai di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Lampung.

Saran

Rancangan sistem pengelolaan yang penulis buat belum maksimal seperti keamanan sistem, data yang tertampil dalam sistem hanya sebagian, dan lain-lain. sehingga bagi pengembang yang akan datang dapat melakukan analisis keamanan atau analisis sistem pengelolaan peta. Sistem ini diharapkan dapat dikembangkan berbasis WEB.

DAFTAR PUSTAKA

A.S. Rosa, dan M. Salahuddin, 2013, *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berbasis Objek*, Bandung, Informatika.

Jogiyanto, H.M, 2003, *Sistem Informasi Strategik. Edisi 1*, Yogyakarta, Andi Offset.

Jogiyanto, H.M, 2005, *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, Yogyakarta, Andi Offset.

Nugroho, Adi, 2005, *Konsep Pengembangan Sistem Basis Data*, Bandung, Informatika.

Pressman, Roger S., 2012, *Rekayasa Perangkat Lunak, jilid I*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Republik Indonesia, 1989, *Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1998 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Di Propinsi Dan Kantor Pertanahan Di Kabupaten/Kotamadya*, Jakarta, Sekretariat Negara.

Republik Indonesia, 2006, *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan*, Jakarta, Sekretariat Negara.

Republik Indonesia, 2015, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional*, Jakarta, Sekretariat Negara.

Republik Indonesia, 2015, *Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Uraian Jabatan Fungsional Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional*, Jakarta, Sekretariat Negara.

[https://www.academia.edu/10423689/Mengembangkan Software yang Lebih Sederhana dengan Extreme Programming XP](https://www.academia.edu/10423689/Mengembangkan_Software_yang_Lebih_Sederhana_dengan_Extreme_Programming_XP)

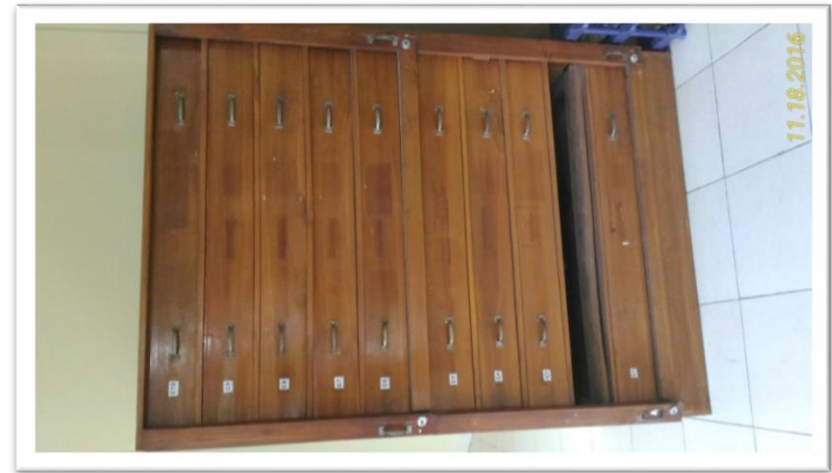
(Diakses tanggal 23 November 2016)

<https://library.binus.ac.id/eColls/eThesdoc/Bab2/2012-1-00666-IF%20Bab2001.pdf>

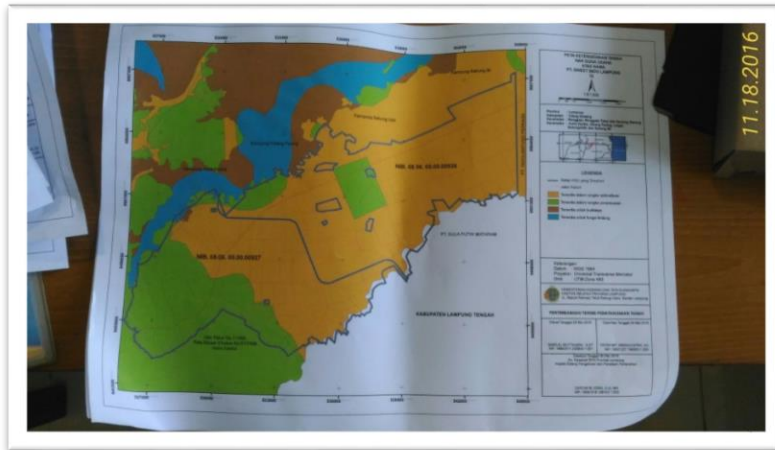
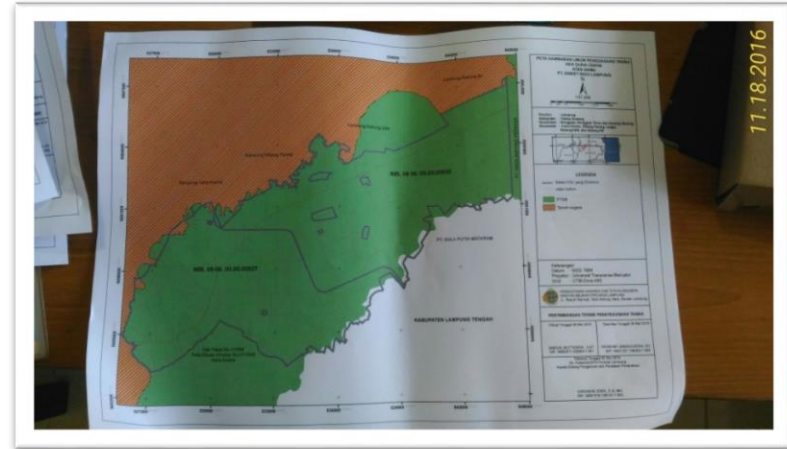
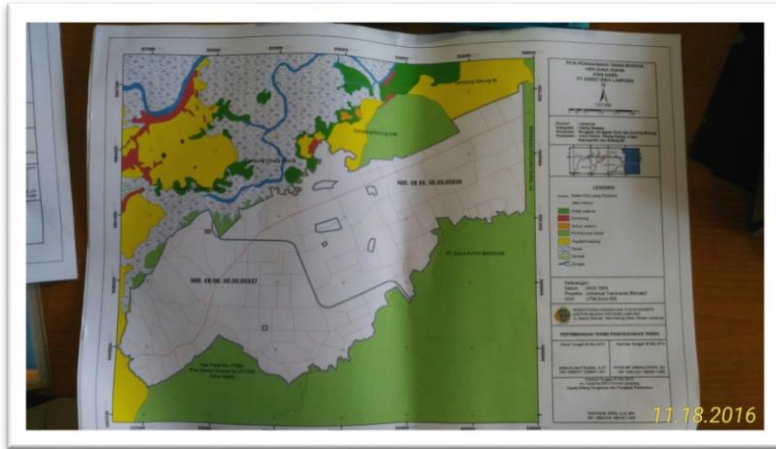
(Diakses tanggal 23 November 2016)

LAMPIRAN

Lemari Penyimpanan



Peta



Lemari Penyimpanan

